



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 14 (empat belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Februari 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.00 s.d 17.40 wib
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Membahas evaluasi dan rencana program/kegiatan di bidang perkeretaapian
Ketua Rapat : Drs. Yoseph Umarhadi, MSi, MA
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Dirjen Perkeretaapian, Direksi PT KAI, dan Direksi PT INKA beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah membahas evaluasi dan rencana program/kegiatan di bidang perkeretaapian.
3. Ketua mempersilakan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan daya serap anggaran dimana sampai per 31 Desember 2009 pada :
 - a. BA 022/ Reguler daya serapnya Rp 2,827 Triliun atau hanya 74,08 %;
 - b. Stimulus Fiskal daya serapnya Rp 594,76 Miliar atau sebesar 98,81 % dan 100% Kinerja Fisik; dan
 - c. BA 999 daya serapnya sebesar 96,22 %.selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi dalam upaya perbaikan daya serapnya pada TA 2010 dengan melakukan penyusunan/pelaksanaan anggaran secara cermat dan tepat.

2. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian untuk menetapkan kebijakan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan massal sebagai alternatif moda transportasi.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sarana dan prasarana Perkeretaapian termasuk yang dikerjasamakan dengan Pihak Kedua dan/atau Pemerintah daerah dan segera dapat disampaikan kepada Komisi V DPR RI.
4. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan agar dapat menetapkan kebijakan yang menunjang pada ketepatan waktu (*On Time Performance*) perjalanan Kereta Api.
5. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menelusuri program/ kegiatan yang dibiayai oleh PHLN yang bermasalah, sehingga pada Tahun Anggaran mendatang kejadian serupa tidak terulang.
6. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya membentuk Badan Usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai dengan UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
7. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan monitoring penggunaan Public Service Obligation (PSO) dan tarif ekonomi secara transparan. Selanjutnya Komisi V DPR RI akan mengagendakan pembahasan Public Service Obligation (PSO) dan masalah tarif.
8. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian kelas ekonomi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang lebih luas dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi.
9. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi pada PT.INKA dalam upayanya meningkatkan kemandirian bangsa khususnya di industri perkeretaapian nasional. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KAI dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk lokomotif dan gerbong, lebih mengutamakan produk dalam negeri (PT. INKA) tanpa mengesampingkan kualitas dan nilai ekonomisnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.

Jakarta, 4 Februari 2010

KETUA RAPAT,

TTD

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

